
Peran PPKN Bagi Generasi Muda dalam Membangun Kesadaran Hukum di Era Globalisasi

Gusti Ngurah Alan Yudistira Mendala^[1], Muhamad Jodi Setianto^[2], Jamaludin^[3]

^{[1][2]} Universitas Pendidikan Ganesha,

^[3] PT Jamkrindo Cabang Denpasar.

*Penulis Korespondensi: ngurahalan@gmail.com, jodi.setianto@undiksha.ac.id
jamaludin@jamkrindo.co.id

***Abstract.** In the era of globalization, this is an era that presents its own challenges for the younger generation in maintaining national identity and legal awareness. Pancasila and Citizenship Education (PPKN) play an important role in building legal awareness for the younger generation in this era of globalization. Pancasila and Citizenship Education (PPKN) aim to instill Pancasila values which include divinity, nationality, humanity, unity, democracy and social justice. These values are very important in shaping the character of Indonesian citizens, especially the obedient young generation of the nation's successors. and have an awareness of the importance of law. Through this PPKN, it is hoped that the younger generation can understand how important the law is in maintaining and regulating order and justice in Indonesia. Apart from that, the younger generation is also expected to be able to develop attitudes of tolerance, nationalism and play an active role in building social life. In this way, PPKN has a major contribution in building legal awareness with integrity among the younger generation in the midst of challenges in the current era of globalization..*

Keywords: *PPKN; Law; Globalization*

Abstrak. Di era globalisasi, yang dimana adalah era yang memberikan tantangan tersendiri bagi generasi muda dalam mempertahankan identitas nasional dan kesadaran hukum. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) memegang peran penting dalam membangun keasadaran hukum bagi generasi muda di dalam Era globalisasi ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) memiliki tujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan, kebangsaan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, nilai-nilai ini merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk karakter warga negara Indonesia terkhususnya para generasi muda penerus bangsa yang taat serta memiliki kesadaran tentang pentingnya hukum. Melalui PPKN ini, diharapkan para generasi muda dapat memahami betapa pentingnya hukum dalam menjaga serta mengatur ketertiban dan keadilan di Indonesia ini. Selain itu juga para generasi muda diharapkan mampu membangun sikap toleransi, nasionalisme, dan berperan aktif membangun kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian PPKN memiliki kontribusi besar dalam membangun kesadaran hukum yang berintegritas kepada para generasi muda di tengah tantangan di era globalisasi saat ini.

Kata kunci: PPKN, Hukum, Globalisasi

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi generasi muda di era globalisasi ini. Dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi dinamika globalisasi yang semakin kompleks dan rumit. Banyak aspek kehidupan manusia telah diubah oleh globalisasi, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Fenomena ini menimbulkan banyak masalah dan peluang baru, fenomena ini tidak hanya menciptakan

peluang baru tetapi juga menimbulkan masalah yang beragam. Salah satunya adalah kesulitan untuk mempertahankan identitas nasional dan kesadaran hukum di tengah kemajuan teknologi dan pengaruh budaya asing yang kuat (Nugroho et al., 2025). Indonesia mengakui pentingnya kesadaran hukum di era globalisasi. Sangat penting untuk memiliki kesadaran hukum untuk memastikan bahwa orang-orang memahami hak dan kewajiban mereka dan bertindak sesuai dengan hukum. Membangun kesadaran hukum, bagaimanapun, bukanlah tugas yang mudah, terutama di lingkungan dengan mobilitas tinggi, pertukaran budaya, dan penetrasi teknologi informasi yang luas. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda di seluruh Indonesia (Gufran & Rostati, 2025). Tujuan PPKN selain memberikan pengetahuan hukum adalah untuk menanamkan nilai-nilai etika, moral, dan patriotisme yang akan membangun bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip ini, yang didasarkan pada Pancasila, tidak hanya berlaku di tingkat lokal, tetapi juga memiliki dampak yang luas.

Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum, nilai, dan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah tujuan dari PPKN sebagai bagian dari program pendidikan di Indonesia. Anak-anak Indonesia belajar tentang hak asasi manusia (HAM), keadilan sosial, dan demokrasi melalui PKN (Rahmadewi et al., 2024)). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa siswa dapat menggunakan pelajaran ini untuk membangun masyarakat dan negara di masa depan. Namun, peran PPKN dalam membangun kesadaran hukum tidak boleh dianggap sepele dalam menghadapi tantangan globalisasi. Seringkali, globalisasi memiliki potensi untuk mengubah budaya, nilai-nilai penting, dan cara orang melihat keadilan dan hukum (Ibrahim et al., 2025). Karena itu, satu tantangan bagi PPKN adalah menggabungkan nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai universal sehingga dapat membentuk individu dengan kesadaran hukum yang kuat sambil mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai bangsa. Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki peran pendidikan non-formal (PPKN) dalam membangun kesadaran hukum bagi generasi muda di era globalisasi ini. Diharapkan jurnal ini akan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi guru, siswa, dan siswa tentang pentingnya PPKN dalam menghadapi tantangan globalisasi dan menumbuhkan kesadaran hukum yang kuat di kalangan generasi muda Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah studi literatur yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis literatur yang relevan dengan topik yang dibahas yaitu PPKN dan Hukum. Peneliti akan mengidentifikasi sumber-sumber dari makalah, jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang terkait dalam materi. Kemudian, peneliti akan mengevaluasi dan mensintesis informasi dari literatur tersebut untuk memahami kerangka konseptual dan isu-isu yang relevan dengan penelitian Anda. Peneliti mengidentifikasi sumber-sumber teks yang relevan. Ini melibatkan pencarian di berbagai media informasi baik media cetak dan digital seperti, internet, makalah, serta jurnal ilmiah. Peneliti mencari artikel, buku, makalah konferensi, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan topik penelitian. Pencarian ini memastikan bahwa peneliti memiliki akses ke informasi yang diperlukan untuk memahami isu-isu yang sedang diteliti.

Setelah mengumpulkan literatur, peneliti mengevaluasi setiap sumber. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kualitas, relevansi, dan keandalan informasi yang disajikan. Peneliti memeriksa metodologi penelitian, sampel informasi, dan hasil yang ditemukan dalam literatur. Dengan memahami kelebihan dan kelemahan setiap sumber, peneliti dapat memilih literatur yang relevan dan berkualitas tinggi. Peneliti kemudian menyusun lalu menggabungkan informasi dari literatur-literatur yang telah dikaji. Ini melibatkan penggabungan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk membangun konsep yang kuat dalam menyusun jurnal ini. Peneliti mengidentifikasi pola, tren, dan perbedaan dalam literatur yang relevan. Dengan demikian, peneliti dapat memahami isu-isu yang relevan dengan penelitian dan mengembangkan landasan teoritis yang kokoh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah penelitian menunjukkan peran PPKN dalam membangun kesadaran hukum bagi para generasi muda dapat menjadi wahana dalam peningkatan kesadaran mengenai peran dan tanggung jawab warga negara pada generasi muda (Sila, 2024). PPKN juga memberikan ilmu pengetahuan tentang betapa pentingnya hukum serta penegakannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Maka dari itu juga peran PPKN dalam upaya membangun kesadaran para generasi muda dalam penegakan hukum adalah mengurangi maraknya pelanggaran dan bahkan penyalahgunaan hukum yang sedang

marak terjadi di Indonesia (Ibrahim et al., 2025). Dengan kata lain PPKN memegang peran yang sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia khususnya terutama di era globalisasi ini. Di era globalisasi ini dengan segala dinamika dan juga tantangannya, telah membawa perubahan yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, hal ini termasuk aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik yang ada di negara ini. Di tengah tantangan dari kemajuan teknologi dan informasi serta pengaruh budaya-budaya asing yang terkadang mengancam identitas bangsa, maka disanalah PPKN menjadi fungsi utama sebagai benteng pertahanan yang berisikan nilai-nilai hukum serta kebangsaan yang berakar pada dasar Pancasila (Putrie et al., 2025). Nilai-nilai luhur dari dasar negara kita ini yang terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan juga keadilan, menjadi pondasi utama para generasi muda dalam pembentukan karakter berbangsa Indonesia. Penanaman nilai-nilai Pancasila dalam PPKN bertujuan memberikan ilmu pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar tersebut dalam diri para generasi muda. Ketika para generasi muda ini sudah bisa memahami dan bahkan menerapkan ajaran nilai-nilai Pancasila, mereka akan mampu menegakkan keadilan, bertanggung jawab, serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Dari sinilah kita tau bahwa PPKN membantu membentuk seseorang tidak hanya menjadi pribadi yang cerdas tetapi memiliki moral dan etika yang tinggi

PPKN juga memberikan pemahaman dasar tentang sistem hukum di Indonesia. Dalam pembelajaran PPKN, para siswa diajarkan mengenai peraturan perundang-undangan, institusi hukum serta perannya dan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan dasar ini sangat membantu para siswa dalam memahami struktur dan fungsi sistem hukum yang ada di Indonesia. Dengan pemahaman dasar seperti ini, para siswa mengetahui dan menghargai peran hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini jugalah yang mendorong dan memotivasi para siswa agar patuh terhadap hukum yang berlaku dan berpartisipasi aktif dalam penegakan keadilan (Fadlilah & Kuswanto, 2024). Selain hal yang sudah disebutkan tadi, peran PPKN memberikan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pengetahuan tentang HAM sangatlah penting karena mengacu pada suatu hal yang menjadi apa yang kita miliki semenjak kita lahir. Pengetahuan tentang HAM bertujuan agar para siswa dapat mengembangkan kesadaran betapa pentingnya menghormati hak-hak orang lain dan bertindak sesuai

dengan kemanusiaan dan keadilan. Dengan pemahaman yang baik tentang HAM, para generasi muda akan lebih peka terhadap isu-isu tentang keadilan dan hak asasi manusia yang sedang terjadi serta para generasi muda dapat membela dan menjaga keadilan dan juga HAM baik di Indonesia maupun luar negeri.

Globalisasi sering kali membawa pengaruh negatif maka dari itu pemahaman tentang PPKN dapat menjadi solusi utama dari dampak negatif globalisasi. PPKN mengajarkan betapa pentingnya kesadaran hukum dengan cara mematuhi dan berpartisipasi aktif dalam penegakan keadilan yang sangat membantu masyarakat dan negara. Partisipasi ini dapat dilihat dari berbagai bentuk mulai dari aktif dalam organisasi kemasyarakatan hingga aktif dalam politik demi membangun bangsa dan negara. Dengan berpartisipasi aktif, para generasi muda dapat menyuarakan aspirasi dan ikut serta dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Partisipasi seperti ini membangun kesadaran betapa pentingnya kontribusi dari satu orang dalam menjaga dan mengatur pemerintahan di suatu negara. Kemampuan dalam berpikir kritis menjadi fokus utama dalam PPKN. Melalui PPKN ini para siswa diajak untuk melihat serta menganalisis berbagai kasus hukum yang sedang terjadi lalu para siswa dapat memberikan evaluasi dengan memberikan saran dan pendapat mereka terhadap kebijakan hukum tersebut. Kemampuan berpikir kritis inilah yang menjadi senjata utama dalam memilah hal positif dan membuang hal negatif di era globalisasi ini (Sila, 2024).

Secara keseluruhan, PPKN berperan dalam membangun kesadaran hukum di Indonesia. Melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, pemahaman dasar tentang hukum, pendidikan tentang Hak Asasi Manusia, dan penguatan terhadap identitas nasional membentuk kalangan generasi muda yang cerdas dan juga berpikiran kritis di era globalisasi. Selain itu juga PPKN mengajarkan untuk memiliki integritas dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Dengan demikian pula PPKN berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan beradab, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan dari Pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai wadah dalam membangun para generasi muda yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dapat menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, serta memiliki komitmen dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Untuk membentuk seorang karakter cerdas dan cakap dalam hal berwawasan luas dan memiliki keasadaran tentang hukum maka pendidikan menjadi hal yang paling penting dalam membentuk karakter tersebut. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaran merupakan sebuah sarana yang tepat dalam pembentukan karakter pada generasi muda yang cinta akan tanah air. Dalam pengajaran dari PPKN ini siswa diajarkan tentang berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, politik, dan hukum yang bertujuan dalam memajukan serta membangun bangsa dan negara ini, termasuk juga sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan cara mengkritik penyalahgunaan konstitusi dan sistem pemerintahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan budaya Indonesia. PPKN di Indonesia ini merupakan hal yang utama dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hukum, nasionalisme, toleransi, dan persatuan di kalangan generasi muda yang siap dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Di era inilah perubahan berkembang sangat pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu contoh perkembangan di era globalisasi adalah perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat membawa pengaruh budaya dan nilai-nilai dari berbagai belahan dunia. Maka dari sinilah peran dan implementasi dari PPKN menjadi sangat penting dalam menyerap hal positif dari era globalisasi ini. Implementasi dari PPKN ini memastikan bahwa para generasi muda harus bisa menyerap dan menginternalisasi nilai-nilai hukum yang nantinya akan sangat berguna bagi kemajuan bangsa dan bahkan internasional.

Integrasi kurikulum yang relevan dan adaptif merupakan pengimplementasian PPKN di era globalisasi ini khususnya untuk para siswa. Hal ini bertujuan mengajarkan nilai-nilai hukum dan kewarganegaraan kepada para siswa dengan kurikulum PPKN yang sudah diperbarui agar relevan dengan kondisi dan tantangan zaman saat ini. Materi pelajaran perlu mencakup topik dan materi yang tidak hanya berhubungan dengan hukum dan peraturan yang ada di Indonesia, tetapi juga dalam lingkup internasional. Contohnya, selain mempelajari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, siswa juga diajak untuk memahami prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia. Maka dengan materi dan topik pembelajaran yang seperti ini bisa membantu siswa dalam berpikir kritis memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri. Integrasi seperti ini menciptakan wawasan luas bagi para siswa dan dapat

mengembangkan pemikirannya terhadap peran hukum yang terjadi dalam menjaga keamanan, ketertiban =, dan juga keadilan bagi par masyarakat luas.

Implementasi dari pembelajaran PPKn harus menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif, yang di mana para siswa tidak hanya menjadi menerima informasi yang diberikan oleh para gurunya akan tetapi ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran. Seperti contoh pada saat sedang dilakukannya diskusi kelas, simulasi sidang, debat, dan studi kasus hal seperti ini bisa menjadikan para siswa lebih komunikatif dan cakap dalam memberikan pendapat tentang suatu hal yang terjadi, lalu dengan cara ini para siswa diajak untuk menganalisis dan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang nyata ini sangat membantu mereka untuk memahami pemahaman dasar dari prinsip-prinsip hukum yang mereka pelajari. Pendekatan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik tetapi juga meningkatkan dan mengasah para sisiwa untuk mampu berpikir kritis dan berani dalam menyuarakan pendapat mereka

Contoh lain implementasi PPKN Di era globalisasi, teknologi dan media digital memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari baik di kalangan anak muda hingga orang dewasa. Oleh karena itu, pembelajaran PPKN juga harus memanfaatkan teknologi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah. Penggunaan platform e-learning, video pembelajaran, dan aplikasi pendidikan dapat membantu menyampaikan materi PPKN dan materi pembelajaran lain yang ada di kelas secara lebih interaktif dan menarik. Selain itu, media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk mendiskusikan masalah-masalah hukum yang sedang hangat terjadi di saat ini, sehingga siswa dapat lebih mudah mengakses informasi dan berdiskusi tentang hukum dalam konteks yang relevan dan aktual. Pemanfaatan teknologi bertujuan agar para siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia yang semakin digital. Selain kegiatan yang berada di dalam kelas, kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi yang berfokus pada hukum dan kewarganegaraan juga penting. Klub debat, simulasi sidang, organisasi siswa, dan kegiatan sosial lainnya dapat menjadi wadah bagi siswa dalam pengimplementasian PPKN dalam situasi nyata. Kegiatan diluar pelajaran seperti ini tidak hanya mengasah kemampuan siswa dalam berbicara dan berargumen, tetapi juga memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya hukum dalam kehidupannya menjalani organisasi di sekolah.

Para siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi juga membangun rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif dalam komunitas mereka.

Salah satu hal penting yang dapat mendorong para siswa agar bisa lebih mengimplementasikan PPKN dalam membangun kesadaran hukum adalah dengan cara bekerjasama dan kolaborasi antara sekolah dengan institusi hukum seperti contoh sekolah mengundang para praktisi hukum seperti jaksa, hakim, polisi dan praktisi hukum lainnya guna menambah wawasan siswa dalam penegakan hukum yang mana hal ini juga penting dalam implementasi PPKN. Melalui kunjungan lapangan, seminar, dan program magang, siswa dapat melihat secara langsung bagaimana sistem hukum dapat bekerja dan berdiskusi serta bertukar pendapat dengan para praktisi hukum (Purwanti & Trisiana, 2024). Pengalaman seperti ini memberikan wawasan praktis dan memperkuat pemahaman teoritis serta menambah pemahaman tentang apa yang mereka pelajari di kelas. Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat dan organisasi non-pemerintah dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang peran hukum dalam mempromosikan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia (Sila, 2024). Hal seperti inilah yang memberikan dorongan kepada para siswa untuk mempelajari dan mengimplementasikan hal apa yang di ajarkan di dalam pembelajaran PPKN ini. Dengan cara seperti ini di harapkan para siswa kelak akan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat serta kesadaran hukum yang tinggi.

Secara keseluruhan, implementasi dari PPKN yang baik dan juga efektif akan memerlukan pendekatan yang holistik, adaptif, dan partisipatif. Dengan cara memperbarui kurikulum pembelajaran di indonesia, menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan interatif, memanfaatkan teknologi dalam memberikan materi, mengembangkan kegiatan diluar pelajaran seperti organisasi dan ekstrakurikuler, dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak pengimplentasian dari PPKN dapat menjadi suatu kebiasaan bagi para siswa khususnya dalam rangka membngun kesadran hukum di indonesia. Dengan membangun kesadaran hukum yang kuat sejak dini para generasi muda akan siap menghadpi tantangan yang mengancam di masa depan baik di dalam maupun luar negeri (Humaeroh & Dewi, 2021). Memiliki kesadaran hukum yang baik adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan beradab, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia di era globalisasi ini. Selain itu juga dengan cara pendidikan

berperan penting mengubah karakter negatif menjadi karakter yang positif ini akan berpengaruh dalam pembentukan karakter bangsa di masa depan (Fadlilah & Kuswanto, 2024). Generasi muda saat ini telah dihadapkan dengan realita yang dimana banyak orang mulai terpengaruh dengan adanya dampak dari globalisasi yang sangat mempengaruhi aspek kehidupan kita, termasuk dalam implementasi dari nilai-nilai yang diberikan oleh pembelajaran PPKN di sekolah. Dalam konteks ini, PPKN memiliki berperan aktif sebagai mata pelajaran yang tidak hanya mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku (Nugroho et al., 2025). Salah satu dampak globalisasi yang saat ini sedang marak terjadi adalah masuknya berbagai budaya dan nilai-nilai asing yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan tingkah laku para generasi muda. Sebagai contoh seperti eksposur yang tinggi terhadap budaya pop Barat melalui media sosial dan hiburan dapat membuat generasi muda lebih terpengaruh oleh nilai-nilai individualisme dan konsumerisme, hal inilah yang bertentangan dengan jiwa persatuan serta sila-sila yang dianut dalam Pancasila.

Hal-hal seperti inilah dapat menjadi tantangan dalam implementasi PPKN karena nilai-nilai asing tersebut bisa menjadi saling bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan negara Indonesia. globalisasi juga membuka akses terhadap informasi dan pengetahuan yang lebih luas bagi generasi muda (Waruwu et al., 2025). Melalui gadget dan internet mereka dapat dengan mudah mencari dan mengakses berbagai sumber belajar baik tentang PPKN dan hukum maupun pembelajaran lainnya baik dari dalam maupun luar negeri melalui website internet. Hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk lebih memahami konsep hukum, prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan, yang merupakan nilai-nilai yang sejalan dengan landasan negara kita yaitu Pancasila (Gufran & Rostati, 2025). Namun disini kita tau bahwa kemajuan teknologi dapat memberi pengaruh baik maupun buruk, yang menjadi permasalahan saat ini ialah jika kita menjumpai anak-anak yang memanfaatkan teknologi bukan untuk suatu hal yang baik dan bermanfaat, anak-anak malah mulai mengikuti budaya asing yang bertentangan dengan moral bangsa indonesia seperti menonton hal-hal yang berbau pornografi atau bahkan melakukan suatu aksi tersebut

sebagai contoh seks bebas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, melakukan LGBT dan masih banyak hal buruk yang lainnya.

Agar kejadian tersebut tidak terjadi pada bangsa kita maka diperlukan penguatan akan pemahaman dan pengimplementasian dari PPKN ini serta negara harus memberikan penegakan hukum terhadap suatu hal semacam ini dan bertindak tegas dengan cara memblokir website yang dapat merusak moral dan pikiran anak, memberikan pidana bagi seseorang yang menyebarkan konten-konten tidak senonoh yang dapat merusak anak, serta memperbaharui dan mengatur undang-undang atau peraturan baru tentang dampak negatif dari kemajuan teknologi dan informasi ini. Salah satu tantangan lain yang dihadapi dalam membangun kesadaran hukum di antara generasi muda adalah adanya ketimpangan antara hukum yang ada dalam teori dan implementasinya dalam prakteknya didalam kehidupan sehari-hari. Meskipun memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka, banyak generasi muda yang belum memiliki akses yang memadai terhadap sistem peradilan yang adil dan efisien (Purwanti & Trisiana, 2024). Selain itu, adanya perbedaan dalam akses terhadap pendidikan dan informasi antara kota dan daerah pedesaan juga dapat menjadi hambatan dalam membangun kesadaran hukum yang merata di seluruh negeri.

Dalam menghadapi tantangan ini, harus ada upaya dalam memajukan pendidikan baik formal, non-formal, maupun informal tentang pentingnya belajar PPKN dan hukum agar dapat menjadi landasan dasar bagi para siswa yang nantinya akan memegang kendali atas negara ini. Selain itu, peran aktif dari berbagai pihak, termasuk juga pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, dalam menyediakan akses yang adil dan merata terhadap informasi dan pendidikan tentang PPKN yang berguna untuk membangun kesadaran hukum juga sangat diperlukan. Dengan demikian, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila dan hukum serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam konteks lokal maupun global. Sebagai contoh nyata dari realita yang terjadi saat ini, kita dapat melihat bagaimana generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai platform dalam menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak-hak mereka. Misalnya, di Indonesia, kita sering melihat gerakan aktivis di media sosial yang menyuarakan isu-isu sosial, politik, dan lingkungan. Mereka menggunakan platform

sosial media seperti Twitter, Instagram, dan YouTube untuk membagikan informasi serta menggalang dana hal ini dilakukan agar membangun kesadaran publik tentang isu-isu tertentu dan mendapat simpati dari masyarakat agar bisa lebih mendorong mereka dalam menyuarkan keadilan (Nugroho et al., 2025).

Contohnya, gerakan #SavePapua yang baru-baru ini sedang hangat dibahas dan sering muncul di media sosial sebagai respons terhadap konflik yang terjadi di Papua. Generasi muda dari berbagai latar belakang suku, ras, etnis, dan agama menggunakan platform media sosial tersebut untuk membagikan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua, seperti kasus-kasus pelanggaran seperti kekerasan dan diskriminasi. Mereka juga menggunakan media sosial untuk menggalang dukungan dan menuntut perubahan dari pemerintah dalam menangani masalah tersebut (Fadlilah & Kuswanto, 2024). Selain itu, dalam konteks pembangunan kesadaran hukum, generasi muda juga aktif dalam menyebarkan informasi tentang hak-hak mereka sebagai warga negara. Misalnya, dengan adanya kampanye tentang hak-hak konsumen yang disebarkan melalui media sosial, karena hal ini generasi muda menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka saat berbelanja atau menggunakan jasa layanan. Mereka juga terlibat dalam diskusi online tentang peraturan hukum terkait perlindungan konsumen dan cara melindungi diri mereka sendiri dari praktik-praktik bisnis yang merugikan.

Namun demikian, terdapat juga tantangan dalam penggunaan media sosial sebagai sarana untuk membangun kesadaran hukum. Misalnya, tersebarnya informasi yang tidak valid atau hoaks dapat membingungkan generasi muda dan membuat mereka sulit membedakan antara informasi yang benar dan yang salah. Hal ini dapat mengurangi efektivitas upaya membangun kesadaran hukum jika generasi muda terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat atau tidak berdasar. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi generasi muda untuk terus meningkatkan literasi digital mereka, termasuk kemampuan untuk memverifikasi informasi yang mereka dapatkan di media sosial. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dalam menyediakan pendidikan dan informasi yang akurat tentang hukum melalui berbagai platform juga menjadi kunci dalam membangun kesadaran hukum yang kuat di kalangan generasi muda. Dengan demikian, generasi muda dapat menggunakan media sosial secara positif sebagai alat untuk memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dan hak-hak

mereka sebagai warga negara. Disinilah peran para generasi muda menjadi peran yang sangat penting baik dalam menjaga persatuan, kebhinekaan serta menjaga keadilan dengan menegakkan hukum serta menjalankan kepemimpinan agar memimpin bangsa ini kearah yang lebih maju (Yani,2023)

Pada intinya pembelajaran PPKN tidak hanya menjadi pondasi untuk membangun kesadaran hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah (Novitasari et al., 2023). Secara keseluruhan, peran PPKN dalam membangun kesadaran hukum bagi generasi muda Indonesia di era globalisasi sangatlah penting. Melalui pendidikan ini, diharapkan generasi muda dapat berperan aktif dalam perubahan yang berkomitmen pada penegakan hukum, pembangunan berkelanjutan, serta menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa Indonesia. Implementasi dari pembelajaran yang diajarkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dalam membangun kesadaran hukum di era globalisasi merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam mempersiapkan dan mematangkan para generasi muda untuk menghadapi tantangan hukum yang kompleks dalam nasional maupun global. Melalui materi yang diberikan, implementasi PPKN mampu membangun sebuah pondasi yang kokoh dalam hal tentang pemahaman dari nilai-nilai moral, etika, dan hukum yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan dengan memperkuat kesadaran hukum melalui pendekatan PPKN, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih sadar akan hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum lokal maupun global (Aulia & Dewi, 2022).

Pengajaran interaktif juga memegang peranan utama dalam proses implementasi PPKN. Melalui pendekatan yang aktif dan partisipatif, siswa dapat diajak untuk terlibat secara langsung dalam diskusi kelompok, studi kasus, dan permainan peran yang memungkinkan mereka untuk mengimplementasikan konsep-konsep tentang aturan hukum dalam situasi dunia nyata. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan analisis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta dapat memberikan solusi atas isu-isu yang sedang hangat terjadi (Ibrahim et al., 2025). Penggunaan dari teknologi juga dapat menjadi sarana efektif dalam implementasi PPKN apalagi di era globalisasi seperti ini. Dengan adanya platform pembelajaran dalam jaringan atau online dengan memanfaatkan sumber daya digital yang

tersedia secara luas seperti website, media sosial, dan lain sebagainya, para siswa dapat memperoleh akses yang lebih luas dan juga fleksibel terhadap materi PPKN dan hukum, bahkan di luar lingkungan sekolah (Putrie et al., 2025). Dengan penggunaan teknologi, pengajaran tentang pentingnya kesadaran hukum dapat menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak orang, sehingga mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat secara luas. implementasi PPKN dalam membangun kesadaran hukum di era globalisasi memerlukan suatu kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan cara seperti ini serta pemanfaatan berbagai platform media sosial yang tersedia, diharapkan bahwa PPKN dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pembentukan generasi muda yang sadar hukum, berintegritas, berkarakter, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan kompleks dalam era globalisasi yang terus berkembang (Purwanti & Trisiana, 2024).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memegang peranan penting bagi masyarakat Indonesia terkhususnya para generasi muda di era globalisasi yang semakin kompleks ini (Lubis et al., 2025). Disini PPKN menjadi pondasi dalam menghadapi tantangan-tantangan mengenai perkembangan sosial, politik, dan hukum yang semakin berkembang pesat. PPKN bertujuan mendidik para generasi muda tentang pemahaman akan betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, serta memperkenalkan mereka pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia serta PPKN diharapkan mengajak para generasi muda dalam mengetahui dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia ini. Maka dari itu melalui mata pelajaran ini, para siswa diajak untuk memahami betapa pentingnya memiliki kesadaran akan hukum dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam suatu masyarakat. Dalam PPKN juga para siswa diajak untuk berpikir kritis, rasional, dan kreatif mengenai isu-isu yang terjadi sehingga para siswa dapat memberikan partisipasinya dengan memberikan opini atau pendapatnya mengenai suatu isu tersebut. Dengan cara seperti ini otomatis para siswa akan belajar cara berinteraksi dengan

masyarakat luas dan juga otomatis para siswa akan sadar betapa sangat pentingnya PPKN (Humaeroh & Dewi, 2021).

Realita yang terjadi saat ini kepada para generasi muda mengenai implementasi PPKN sangatlah rumit dan kompleks. Di era globalisasi ini membawa kemajuan teknologi dan interkoneksi global yang memungkinkan akses terhadap informasi dan budaya dari luar negeri. Dampak negatifnya ialah masuknya budaya-budaya Barat yang tidak senonoh dapat mempengaruhi generasi muda untuk meniru perbuatan tersebut, yang mana hal ini tentu saja bertentangan dengan implentasi dari PPKN (Rahmadewi et al., 2024). Hal ini juga menimbulkan tantangan besar terhadap bangsa Indonesia dalam mempertahankan identitas nasional dan nilai-nilai Pancasila di tengah arus budaya global yang dominan. Para generasi muda cenderung terpapar oleh beragam budaya, pandangan, dan nilai-nilai dari berbagai belahan dunia melalui media sosial, internet, dan platform digital lainnya. Dalam konteks implementasi PPKN, hal ini dapat memengaruhi cara mereka memahami dan merespons materi yang diajarkan. Sebagai contoh, pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip kewarganegaraan mungkin menjadi lebih kompleks dan sulit diterapkan karena adanya pengaruh budaya dan nilai-nilai dari luar. Namun demikian, realitas ini juga membuka peluang untuk memperluas wawasan dan perspektif siswa tentang isu-isu global dan lokal, serta memungkinkan mereka untuk mengembangkan sikap inklusif dan toleransi terhadap perbedaan (Novitasari et al., 2023). Salah satu contohnya kita dapat melihat pada masa kini generasi muda aktif memanfaatkan media sosial sebagai platform dalam menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak-hak mereka serta memberikan kritik terhadap ketidakadilan yang terjadi dari dalam bahkan luar negeri. Oleh karena itu, tantangan bagi pendidik adalah bagaimana mengintegrasikan konteks globalisasi dalam pembelajaran PPKN sehingga dapat menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, serta membangun kesadaran akan pentingnya kewarganegaraan yang bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks (Waruwu et al., 2025).

Saran

Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) bagi generasi muda dalam membangun kesadaran hukum sangatlah penting dan harus dijadikan pondasi utama dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Untuk itu, perlu adanya langkah-langkah pasti yang dapat diambil guna memaksimalkan kontribusi PPKN dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan hukum yang kompleks dalam konteks global. Pertama-tama, pendekatan pembelajaran dalam mata pelajaran PPKN haruslah holistik dan terpadu, mencakup pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara, hak asasi manusia, hukum internasional, serta hukum nasional yang relevan. Selain itu, pendekatan interaktif dan partisipatif perlu diterapkan, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi, untuk memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan keterampilan analisis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan yang berbasis hukum serta yang paling penting penyampaian pendapat dan solusi tentang masalah yang terjadi di negara ini. Selanjutnya, integrasi teknologi dalam pembelajaran PPKN juga dapat meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan siswa, melalui penggunaan platform online dan media sosial yang relevan. Di samping itu, kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga perlu diperkuat guna mendukung implementasi PPKN yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, generasi muda akan dapat dibekali dengan pemahaman yang kokoh tentang hukum dan kewarganegaraan, serta mampu menghadapi beragam tantangan hukum dan pengimplentasian PPKN di dalam era globalisasi dengan sikap yang bertanggung jawab, berpikir kritis serta peduli terhadap bangsa dan negaranya.

DAFTAR REFERENSI

- Nugroho, D. K. A., Pertiwi, N. E., & Rahayu, Y. (2025). Konstitusi Dan Identitas Nasional Dalam Membangun Kesadaran Hukum Di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11. A), 1-7.
- Gufran, G., & Rostati, R. (2025). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menata kesadaran hukum bagi generasi muda: Kajian pustaka. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(01), 30-36.
- Rahmadewi, A., Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2024). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa Sekolah Dasar pada Era Globalisasi. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 16-22.

- Ibrahim, A., Safitri, A., & Gea, D. Z. (2025). Peran Pendidikan Pancasila dalam menata kesadaran hukum bagi siswa SMA: kajian pustaka. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1-9.
- Sila, I. M. (2024). Membangun kesadaran hukum warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.
- Putrie, K. A., Syah, E., Krisdiyanto, W. G., Fitria, V. D. B., Aprilia, S. S., & Luruk, J. (2025). Peran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Menanamkan Kesadaran Hukum Sejak Dini Di Ponpes Al Hidayah Depok. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Juni), 3896-3905.
- FADLILAH, E. N., & KUSWANTO, F. (2024). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 268-275.
- Waruwu, I. S. I., Waruwu, F. S. P., Telaumbanua, D. T., & Harefa, H. O. N. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kebangsaan Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 2(2), 31-36.
- Purwanti, I. A., & Trisiana, A. (2024). Peran Pembelajaran PKN Dalam Membangun Kepekaan Terhadap Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Pada Siswa Kelas Viib SMPN 3 Sragen). *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(2), 144-161.
- Lubis, N., Hamidah, H., & Soraya, A. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengatasi Krisis Moral Di Kalangan Generasi Muda. *HEUTAGOGI: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 44-54.
- Triadi, I. Peran Pendidikan Bela Negara Dalam Membangun Kesadaran Kewarganegaraan.
- Humaeroh, S., & Dewi, D. A. (2021). Peran pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi dalam pembentukan karakter siswa. *Journal on Education*, 3(3), 216-222.
- Abdilah, M., Nasution, S. S., Samudra, H., Khasanah, N., Ayu, A. P., & Az-Zahra, S. (2025). Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan: Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Dari Kepedulian Sosial Generasi Muda. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 36-42.
- Novitasari, S., Najicha, F. U., & Hukum, F. H. I. (2023). Pentingnya peran Pancasila bagi generasi muda dalam menghadapi globalisasi. *no. June*, 1-11.
- Aulia, A. R. S., & Dewi, D. A. (2022). Peran Pancasila dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme dan patriotisme generasi muda di era globalisasi. *Journal on Education*, 4(4), 1097-1102.